

# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2016

## TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ogan Komering Ulu Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 781/KPTS/BPKAD/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang

Anggaran 2017;

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

- bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017.

## Mengingat : 1.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

## BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. 2.	Pendapatan Daerah Belanja Daerah			Rp. Rp.		1.113.472.815.500,00 1.147.432.034.027,00	
				Surplus/(Defisit)	Rp.	(33.959.218.527,00)	(-)
3.	Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Rp.			42.959.218.52			
	b.	Pengeluaran	Rp.	9.000.000.00 Pembiayaan		33.959.218.527,00	
Sis	a Leb	ih Pembiayaan	Angga	ıran Tahun Berkena	aan :	0,00	_ (-)
				Donal O			

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	42.495.000.000,00
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	845.275.597.000,00
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	225.702.218.500,00
	seiumlah	1	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

00
00
20
00
20
00

(3)	Dar	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari						
	jenis pendapatan:							
	a.	Dana Bagi Hasil sejumlah	Rp.	112.967.689.000,00				
	b.	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	590.455.796.000,00				
	C.	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	141.852.112.000,00				
(4)	Lair	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)						
	huruf c terdiri dari jenis pendapatan:							
	a.	Pendapatan Hibah sejumlah	Rp.	5.122.040.000,00				
	b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah	Rp.	7.626.867.500,00				
	C.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau	Rp.	13.343.358.000,00				
		pemerinta Daerah Lainnya sejumlah	8.					
	d.	Pendapatan Lainnya sejumlah	Rp.	199.609.953.000,00				
		Pasal 3						
(1)	Bela	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	618.913.781.646,00				
	b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	528.518.252.381,00				
(2)	Bela	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri						
		jenis belanja:						
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	393.453.778.289,00				
	b.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	6.515.600.000,00				
	c.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	600.000.000,00				
	d.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	216.844.403.357,00				
	e.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	1.500.000.000,00				
(3)	Bela	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari						
		jenis belanja:						
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	22.771.311.800,00				
	b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	261.137.552.537,00				
	c.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	244.609.388.044,00				
		Pasal 4						
(1)	Pem	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :						
	a.	Penerimaan sejumlah	Rp.	42.959.218.527,00				
	b.	Pengeluaran sejumlah	Rp.	9.000.000.000,00				

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
     Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

Rp. 20.892.027.152,00

b. Penerimaan Piutang Daerah

Rp. 22.067.191.375,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

- (3) pembiayaan:
  - Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

Rp. 9.000.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

- Lampiran I Ringkasan APBD;
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah,
   Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah,
   Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar piutang daerah;
- Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- 11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Bupati Ogan Komering Ulu Selatan menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

> Ditetapkan di Muaradua pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATE GGAR COMERING ULU SELATAN,

ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

OGAN KOMERING ULU

AH KABUPA

DAERAH

H. 18 KABUPA

H. 18 KABUPA

H. 18 KABUPA

DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 7/OKUS/2016